



Panduan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri

Dosen

(BPP-DN) 2017



Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

II. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai peran dan fungsi strategis dalam mewujudkan amanat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Sebagaimana kita maklumi bersama amanat tersebut adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsinya tersebut, dosen memiliki peran yang sangat strategis. Oleh karena itu dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum dan Sertifikasi Pendidik Profesional sesuai dengan jenjang kewenangan mengajarnya. Amanat tersebut secara jelas tertuang dalam pasal 46 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu bahwa dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum: (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terus berupaya untuk mendorong dan meningkatkan kuantitas dosen yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister melalui beragam pendekatan. Berbagai langkah sistematis dan perbaikan berkelanjutan selalu dilaksanakan baik pada era TMPD, BPPS hingga BPPDN pada saat ini. Sebagai contoh, berbagai kajian menunjukkan adanya kesenjangan kualitas mahasiswa pascasarjana terutama yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Hal ini ditunjukkan oleh tingginya tingkat kegagalan mereka pada tahun pertama pendidikan di program pascasarjana. Mengingat sangat strategisnya posisi dosen/calon dosen di daerah 3T tersebut, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memfasilitasi mereka agar dapat mengikuti program pascasarjana dengan lebih lancar, misalnya dalam bentuk kegiatan-kegiatan afirmatif antara lain *bridging program* atau pra magister. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesuksesan program beasiswa pascasarjana dalam negeri. Selain dalam urusan akademis, perbaikan berkelanjutan juga dilakukan terhadap aspek dukungan keuangan. Besaran beasiswa dan beberapa jenis dukungan pembiayaan selalu dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan terakhir dan didukung oleh kajian yang mendalam.

III. PERKEMBANGAN PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA DALAM NEGERI

Sejak tahun 1976, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah memberikan bantuan beasiswa kepada dosen perguruan tinggi negeri yang mengikuti pendidikan pascasarjana program doktor di dalam negeri. Pemberian bantuan beasiswa tersebut dikelola oleh sebuah tim yang diberi nama Tim Manajemen Program Doktor (TMPD). Hingga tahun 1996, nama TMPD identik dengan danterpateri sebagai program beasiswa peningkatan kemampuan dosen. Program beasiswa tersebut diadakan untuk meningkatkan kinerja program beasiswa yang telah diselenggarakan sebelumnya.

Dalam perkembangannya, program beasiswa TMPD tersebut tidak saja diberikan kepada dosen Perguruan Tinggi Negeri yang mengikuti program doktor (S3), melainkan juga diberikan kepada dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mengikuti program magister (S2). Oleh karena itu, mulai tahun 1997 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengubah nama program beasiswa (TMPD) tersebut menjadi program Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS). Perubahan tersebut secara resmi disahkan melalui Surat Direktur Jenderal Pendidikan Nomor: 360/D2/1997, tanggal 29 Februari 1997.

Dalam pelaksanaannya, program BPPS mempunyai cakupan yang lebih luas, baik dalam jenjang pendidikan maupun penerima beasiswa. Jenjang pendidikan yang diberi beasiswa adalah magister (S2) dan doktor (S3), sedangkan penerima beasiswa diperluas dengan menyertakan dosen Perguruan Tinggi Swasta dan Politeknik. Sejumlah persyaratan tambahan diberlakukan bagi dosen calon penerima beasiswa dari ketiga kelompok perguruan tinggi tersebut.

Dalam upaya mempercepat pencapaian target sebagaimana diamanatkan pasal 46 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mulai tahun 2007 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengambil kebijakan berupa pemberian kepercayaan kepada Program Pascasarjana (PPs) di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta untuk mengelola program BPPS. Program Pascasarjana yang akan mendapat kepercayaan tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan. Tiga diantaranya adalah harus memiliki ijin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang masih berlaku, memenuhi kewajiban untuk melaporkan hasil Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED), dan memiliki peringkat akreditasi sekurang-kurangnya **B** dari Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Tinggi (BAN-PT). Persyaratan selengkapnya disajikan pada buku panduan tersendiri.

Untuk memacu peningkatan kualitas dosen perguruan tinggi, pada tahun 2009 dilakukan perluasan terhadap alokasi BPPS. Pada tahun sebelumnya alokasi BPPS hanya diberikan kepada Sekolah/Program Pascasarjana penyelenggara, namun mulai tahun 2009, alokasi BPPS juga diberikan kepada perguruan tinggi pemilik dosen (yang selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Pengirim) baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Alokasi tersebut disediakan hanya untuk Program Magister (S2). Pemberian alokasi tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada perguruan tinggi dalam merencanakan pengembangan keilmuan melalui peningkatan kualitas dosennya.

Pada tahun 2010, alokasi Perguruan Tinggi Pengirim diperluas, tidak hanya untuk Program Magister (S2), tapi juga diberikan kepada calon penerima yang melanjutkan pendidikannya pada Program Doktor (S3). Bersamaan dengan dibukanya kesempatan untuk melanjutkan ke Program Doktor dengan menggunakan alokasi BPPS Perguruan Tinggi Pengirim, dibuka pula kesempatan bagi Program Doktor pada Perguruan Tinggi Swasta sebagai Penyelenggara BPPS.

Berdasarkan kebijakan dan analisis terhadap implementasi BPPS pada 2011, maka pada tahun 2012 diambil kebijakan untuk meniadakan pembagian kuota PT Penyelenggara maupun kuota PT/Kopertis Pengirim. Hal ini dimaksudkan agar lebih memudahkan pihak Ditjen Dikti dalam pendistribusian calon peserta dan menghindari adanya komunikasi yang kurang lancar (DIKTI-PT/Kopertis pemilik dosen-pelamar BPPS) serta adanya salah persepsi dari PT/Kopertis pemilik dosen yang akan melanjutkan studi jenjang pascasarjana. Selain itu cara ini juga membebaskan perguruan tinggi pengirim dari jumlah kuota yang ditetapkan Ditjen Dikti. Meskipun demikian, mekanisme dan pemberian ijin tugas belajar tetap merupakan wewenang PT/Kopertis Pemilik Dosen dan harus melakukan penetapan status bagi dosen yang diijinkan untuk tugas belajar.

Persyaratan calon penerima BPPS yang mengharuskan berstatus dosen tetap dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli menyebabkan jumlah calon terbatas. Pada tahun 2011, kesempatan penerima BPPS telah diperluas dengan memberi kesempatan bagi dosen tetap yang belum memiliki jabatan fungsional asisten ahli untuk memperoleh BPPS. Pada tahun ini skema peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi diperluas untuk calon dosen yang pada tahap awal diberi nama Beasiswa Unggulan.

Pada tahun 2016, kebijakan sinergi pendanaan beasiswa Pascasarjana antara Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Lembaga Pengelola Pendidikan (LPDP) dilakukan dan merupakan terobosan baru untuk menggabungkan keunggulan LPDP dalam "*cash management*" dengan pengalaman Dikti dalam mengelola Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dengan Perguruan Tinggi mitranya. Kegiatan bersama ini diwujudkan dalam bentuk program Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) yang telah diluncurkan pada tanggal 2 Mei 2016. Berdasarkan tempat belajarnya, peserta BUDI dibedakan dalam dua kategori yaitu Dalam Negeri (BUDI-DN) dan Luar Negeri (BUDI-LN). BUDI-DN telah dialokasikan anggaran yang setara dengan 2.000 penerima beasiswa. Pada tahun 2017 Kemenristekdikti tetap mengalokasikan beasiswa dosen dengan membuka kembali skema beasiswa BPP-DN.

Hal ini penting dilakukan mengingat perguruan tinggi memiliki kader-kader yang berminat menjadi dosen tetapi yang bersangkutan belum memiliki akses untuk pendidikan lanjut. Tantangan lain yang juga mulai dijawab mulai tahun 2012 adalah kesenjangan kualitas mahasiswa pascasarjana dari daerah 3T. Kajian dari beberapa PPs menunjukkan tingginya tingkat kegagalan mereka pada tahun pertama pendidikan di program pascasarjana. Oleh karena itu mulai tahun 2012 diluncurkan Program Beasiswa Pra Magister untuk bidang sains dasar di tiga Perguruan Tinggi (UGM, ITB, ITS, dan IPB mulai tahun 2013). Kebijakan ini diharapkan dapat memfasilitasi calon mahasiswa 3T dapat mengikuti program pascasarjana dengan lebih lancar. Mulai tahun 2013 istilah BPPS dan Beasiswa Unggulan disatukan dalam istilah Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) yang terbagi dalam tiga kategori yaitu Kategori Dosen, Tenaga Kependidikan dan Calon Dosen. Tahun 2015 dengan nomenklatur Kementerian yang baru, Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri bagi dosen dikelola oleh Subdit Kualifikasi Pendidik, sedangkan Beasiswa bagi tenaga kependidikan dikelola oleh Subdit Tenaga Kependidikan Direktorat Kualifikasi SDM, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti.

IV. BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA DALAM NEGERI (BPPDN) UNTUK DOSEN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

1. Memberi kesempatan kepada dosen tetap perguruan tinggi yang berpendidikan magister untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktor;
2. Meningkatkan sumberdaya manusia perguruan tinggi Indonesia yang berkualitas dan berkontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa;
3. Meningkatkan peran dosen dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan dan lulusan perguruan tinggi yang mampu berkontribusi secara nyata dalam peningkatan daya saing bangsa.

3.2 PERKEMBANGAN PENERIMA BEASISWA DALAM NEGERI

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah beasiswa kepada dosen (BPPS), calon dosen dan tenaga kependidikan (Beasiswa Unggulan) untuk program magister (S2) dan/atau doktor (S3) disajikan dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Jumlah Penerima BPPDN Tahun 2011-2015

| Tahun | Jumlah | | Total |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Magister (S2) | Doktor (S3) | |
| 2011 | 3.107 | 2.442 | 5.549 |
| 2012 | 2.533 | 1.520 | 4.053 |
| 2013 | 1.451 | 1.780 | 3.231 |
| 2014 | 724 | 2.213 | 2.937 |
| 2015 | 1.011 | 3028 | 4.039 |
| Total | 8.826 | 10.983 | 19.806 |

3.3 PERSYARATAN CALON PENERIMA BEASISWA PASCASARJANA DALAM NEGERI (BPP-DN) UNTUK DOSEN

Sesuai dengan tujuannya, beasiswa ini diperuntukan bagi **dosen tetap yang telah memiliki NIDN/NIDK**. Secara rinci persyaratan calon penerima BPPDN untuk dosen adalah sebagai berikut.

- a) Dosen tetap pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah mempunyai NIDN/NIDK;
- b) Tidak sedang menjabat dalam jabatan struktural pada perguruan tinggi tempat mengajar;
- c) Memenuhi persyaratan Tugas Belajar yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009. Surat Keputusan Tugas Belajar (sebagaimana tercantum pada peraturan tersebut) harus diperolehnya maksimal satu tahun sejak diterima sebagai mahasiswa. Segala konsekuensi yang diakibatkan oleh tidak diurusnya SK Tugas Belajar tersebut menjadi tanggung jawab dosen yang bersangkutan dan perguruan tinggi yang mengirimnya.

3.4 KETENTUAN PENYELENGGARA PROGRAM BPP DALAM NEGERI

A. Ketentuan umum

Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) untuk dosen di Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti diberikan kepada program studi di PPs Penyelenggara BPP-DN (Lampiran 1) yang menyelenggarakan program studi Doktor (S3), dan telah memperoleh akreditasi BAN-PT.

B. Ketentuan bagi Program/Sekolah Pascasarjana Penyelenggara BPP-DN

1. Minimum 80% penerima beasiswa BPP-DN berasal dari staf atau lulusan luar perguruan tinggi penyelenggara, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
2. BPP-DN diberikan pada mahasiswa yang memulai perkuliahan di **semester gasal** (perkuliahan bulan September).
3. Perguruan tinggi penyelenggara BPP-DN tidak diperkenankan memungut biaya lain kecuali biaya pendaftaran, seleksi, dan wisuda.
4. Dalam memilih pelamar BPP-DN, Direktur/Dekan Program/Sekolah Pascasarjana (PPs) wajib mempertimbangkan empat hal berikut:
 - (1) keterkaitan bidang ilmu program doktor (S3) yang ditempuh dengan bidang ilmu program sarjana (S1) dan magister (S2) pelamar;
 - (2) distribusi berdasarkan asal daerah dan perguruan tinggi secara wajar;
 - (3) penugasan-penugasan khusus dari Dirjen Dikti kepada perguruan tinggi.

5. Daftar usulan di atas diseleksi oleh PPs Penyelenggara dan harus sudah ditetapkan statusnya sebagai pelamar BPP-DN yang memenuhi syarat di PPs Penyelenggara sesuai urutan prioritas (perangkingan) melalui laman beasiswa.ristekdikti.go.id/bppdn selambat-lambatnya pada pertengahan **Juli 2017**.
6. Daftar nama mahasiswa yang diajukan (ditetapkan statusnya) oleh Pimpinan PPs hanya **bersifat usulan**, sedangkan penentuan penerima BPP-DN ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti.
7. Direktur Program/Dekan Sekolah Pascasarjana (PPs) penyelenggara BPP-DN tidak diperbolehkan untuk menjanjikan seseorang menjadi penerima BPP-DN atau memberikan informasi tentang penerima BPP-DN kepada pelamar BPP-DN sebelum Surat Keputusan Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia diterbitkan.
8. Dana BPP-DN untuk tahun pertama akan dibayarkan berdasarkan Kontrak antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti dengan masing-masing PPs Penyelenggara atau mengikuti ketentuan yang berlaku.
9. Demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan, PPs Penyelenggara diharuskan membuat surat perjanjian antara Penerima BPP-DN, Perguruan Tinggi tempat yang bersangkutan bekerja, dan PPs Penyelenggara.
10. Apabila ada penerima BPP-DN mengundurkan diri atau **lulus lebih cepat** dari jangka waktu yang telah ditentukan (36 bulan untuk program doktor/S3), maka seluruh komponen dana BPP-DN yang tidak seharusnya diberikan dan/atau yang tersisa harus **dikembalikan** ke kas negara melalui mekanisme atau prosedur pengembalian yang berlaku.
11. PPs Penyelenggara mempunyai kewajiban untuk mengirim Surat Pengembalian penerima BPP-DN yang telah menyelesaikan studinya ke Perguruan Tinggi tempat yang bersangkutan bekerja, dengan tembusan ke Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti.

C. Ketentuan bagi Calon Penerima BPP-DN

Pelamar BPP-DN untuk dosen harus mendapatkan **persetujuan** pemimpin perguruan tinggi/lembaga asal, dan diajukan kepada Direktur Program/Dekan Sekolah Pascasarjana yang dituju. Bagi pelamar BPP-DN untuk dosen yang berasal dari perguruan tinggi swasta, harus juga memperoleh **surat**

penugasan/ijin dari Kopertis Wilayahnya (Contoh Surat Penugasan/Ijin dapat dilihat pada Lampiran 2).

Ketentuan khusus lainnya adalah sebagai berikut:

1. Pelamar BPP-DN hanya diperbolehkan mengajukan usulan kepada **satu** perguruan tinggi (PT) penyelenggara BPP-DN.
2. BPPDN juga membiayai mahasiswa on going sesuai ketentuan yang berlaku dengan kuota terbatas.
3. Beasiswa tidak diberikan kepada pelamar pada jenjang pendidikan yang sama.
4. Beasiswa tidak diberikan kepada mereka yang sedang menerima beasiswa (yang meliputi: biaya hidup, biaya pembelian buku, biaya penelitian, dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan) yang bersumber dari dana Pemerintah Republik Indonesia.
5. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang memulai perkuliahan pada semester gasal (perkuliahan bulan September).
6. Batas usia penerima BPP-DN Dosen adalah **50 tahun untuk S3** terhitung pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
7. Persyaratan IPK tidak diberlakukan untuk BPPDN dosen. Meskipun demikian PPs Penyelenggara pada umumnya memiliki persyaratan IPK pada saat proses penerimaan mahasiswa baru.
8. Jangka waktu pemberian BPP-DN adalah maksimum **36 bulan** untuk program doktor (S3).
9. Setelah menyelesaikan studi, penerima BPP-DN diwajibkan untuk kembali mengabdikan ke perguruan tinggi tempat bekerjaselama **1n+1 tahun** (*n* adalah lama masa menerima BPP-DN dalam satuan tahun) sesuai Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009.
10. Penerima BPP-DN diwajibkan untuk mengikuti seluruh ketentuan akademik yang berlaku di PPs Penyelenggara BPP-DN dan/atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
11. Penerima BPP-DN yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikenakan sanksi berupa pengembalian dana BPP-DN sebesar dua kali jumlah yang dikeluarkan oleh Pemerintah ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengembalian yang berlaku.

3.5 MEKANISME PENYELENGGARAAN BPP-DN

A. Program/Sekolah Pascasarjana Penyelenggara

- 1) Menginformasikan secara luas tersedianya BPP-DN kepada calon mahasiswa yang memenuhi syarat (lihat Persyaratan Calon Penerima BPP-DN).
- 2) Melakukan seleksi akademik dan administrasi (termasuk ijin dari PTN/Kopertis) di Program Pascasarjana sesuai ketentuan yang berlaku di PPs dan Pedoman BPPDN.
 - (a) Hanya mahasiswa yang terdaftar pada laman *beasiswa.ristekdikti.go.id/bppdn* dan memenuhi persyaratan serta dinyatakan **LULUS** Seleksi Masuk di PPs Penyelenggara saja yang berhak diusulkan untuk memperoleh BPP-DN.
 - (b) Seleksi dan penetapan mahasiswa yang memenuhi Persyaratan Pelamar BPP-DN merupakan tanggung jawab PPs Penyelenggara.
- 3) Menetapkan status Pelamar BPP-DN melalui laman *beasiswa.ristekdikti.go.id/bppdn* sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 4) Menginformasikan SK Penetapan Penerima BPP-DN kepada mahasiswa melalui laman resmi perguruan tinggi dan kepada perguruan tinggi asal mahasiswa.

B. Pelamar BPP-DN

Pelamar BPP-DN harus:

- a. **mendaftarkan diri sebagai pelamar BPP-DN** melalui laman *beasiswa.ristekdikti.go.id/bppdn* dengan memenuhi seluruh persyaratan;
- b. **Memastikan daftar riwayat pendidikan** pada database PDDIKTI (*forlap.dikti.go.id*) telah diisi dengan lengkap dan sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Jika belum lengkap, disarankan untuk menghubungi instansi asal.
- c. **mendaftar ke PPs Penyelenggara** yang dituju dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai pelamar PPs tersebut;
- d. mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan **Proses Seleksi** yang diselenggarakan oleh PPs Penyelenggara tujuan;
- e. melihat hasil Penetapan Penerima BPP-DN yang diumumkan oleh PPs tempat studi;

C. Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti

Mengingat keterbatasan dana pemerintah, maka tahun 2017 kuota beasiswa BPP-DN disediakan sebanyak 1000, sehingga penyelenggara menerapkan kriteria untuk memberikan urutan prioritas para pelamar yang telah dinyatakan diterima oleh para penyelenggara program pascasarjana prioritas penerima beasiswa sesuai dengan bagan alir proses seleksi BPP-DN ditampilkan pada gambar 1. Kriteria seleksi yang akan diterapkan adalah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Kriteria pemberian urutan prioritas

| No. | Kriteria | Bobot |
|-----|--|-------|
| 1. | Relevansi dengan kebutuhan Sumber Daya Dikti | 40 % |
| 2. | Akreditasi institusi dan program studi pascasarjana | 30 % |
| 3. | Kinerja meluluskan penerima beasiswa dosen dalam waktu yang sesuai | 30 % |

Relevansi dengan Kebutuhan Sumber Daya Dikti

Kriteria ini dinilai berdasarkan relevansi program studi yang akan ditempuh dengan kebutuhan dosen di bidang studi tersebut, sehingga dilakukan analisis terhadap data dosen yang memiliki NIDN dan masih berpendidikan S1. Sumber data diambil dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi per 24 Februari 2016. Berdasarkan data di atas, bidang studi yang dosennya masih banyak berpendidikan S1 akan mendapat prioritas dalam penentuan penerima beasiswa dengan pemberian skor untuk bidang studi adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Kriteria bidang studi/kelompok bidang studi

| No. | Bidang Studi/Kelompok Bidang Studi | Nilai |
|-----|---|-------|
| 1. | Komputer, Informatika, Sistem Informasi, Keperawatan, Kebidanan | 5 |
| 2. | Akuntansi, Hukum, Manajemen, Teknik, Kedokteran, Farmasi | 4 |
| 3. | Bidang ilmu lain | 3 |

Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

Kriteria akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi diambil berdasarkan pencapaian jenjang akreditasi baik untuk institusinya maupun program studi dari BAN PT. Pemberian nilai untuk akreditasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Kriteria akreditasi PT dan program studi

| No. | Akreditasi Perguruan Tinggi | Akreditasi Program Studi | Nilai |
|-----|-----------------------------|--------------------------|-------|
| 1. | A | A | 5 |
| 2. | A | B | 4 |
| 3. | B | A | 3 |
| 4. | B | B | 2 |
| 5. | A/B | C | 1 |

Kinerja PPs di Perguruan Tinggi dalam Meluluskan Penerima Beasiswa

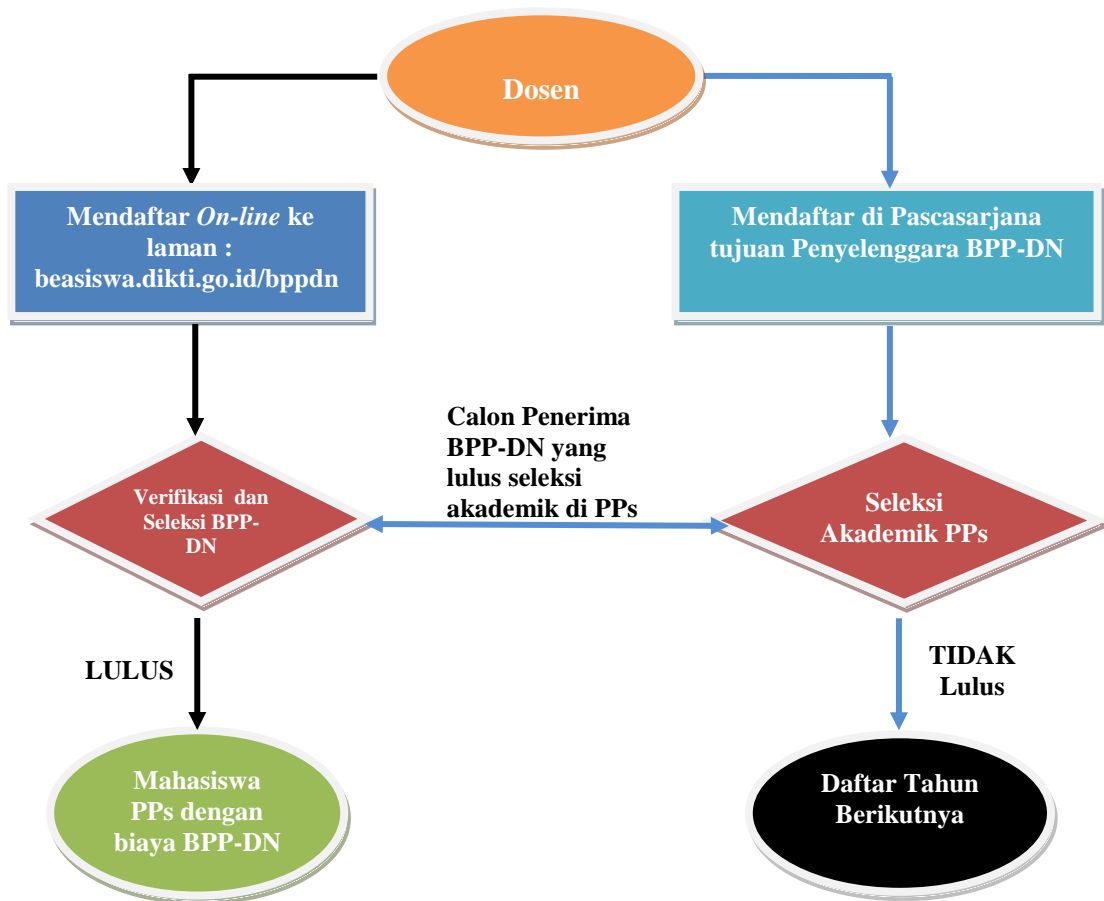
Kriteria ini dinilai berdasarkan kinerja perguruan tinggi penyelenggara dalam meluluskan penerima beasiswa dosen yang belajar di perguruan tinggi tersebut. Sumber data yang digunakan untuk memperhitungkan kinerja PPs penyelenggara adalah data yang tersimpan di <http://studi.ristekdikti.go.id>. Sebagaimana kita ketahui perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk memutakhirkan data yang ada di laman tersebut di atas sesuai dengan perkembangan studi mahasiswanya. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan data mahasiswa S3 angkatan 2009 dan 2010 serta mahasiswa S2 angkatan 2011 dan 2012. Berdasarkan data ini dihitung jumlah penerima beasiswa yang belum dan telah lulus. Selanjutnya dihitung rasio antara yang belum lulus terhadap total penerima beasiswa di perguruan tinggi tersebut. Persentase yang belum lulus inilah yang dijadikan dasar untuk pemberian nilai sesuai dengan tabel berikut ini.

Tabel 5. Kinerja PPs di PT dalam meluluskan penerima beasiswa

| No. | Persentase penerima beasiswa yang belum lulus | Nilai |
|-----|---|-------|
| 1. | Maksimal 10 persen untuk jenjang S2 atau S3 | 5 |
| 2. | Lebih dari 10 persen tetapi maksimal 20 persen untuk jenjang S2 atau S3 | 4 |
| 3. | Lebih dari 20 persen tetapi maksimal 30 persen untuk jenjang S2 atau S3 | 3 |
| 4. | Lebih dari 30 persen tetapi maksimal 40 persen untuk jenjang S2 atau S3 | 2 |
| 5. | Lebih dari 40 persen untuk jenjang S2 atau S3 | 1 |

Penghitungan Nilai Total

Nilai total akhir diperoleh dari setiap kriteria dikalikan dengan bobot dari kriteria tersebut. Nilai terbobot inilah yang kemudian dijumlahkan dan dijadikan dasar untuk memberikan no urut (prioritas) calon penerima beasiswa.



Gambar 1. Alur seleksi BPPDN

3.6 KOMPONEN BIAYA BPP-DN

Komponen Biaya BPP-DN dapat dilihat pada Tabel 6 (semua komponen tersebut tidak dikenakan pajak).

Tabel 6 Standar Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri
(Per orang/Semester)*

| No. | Komponen Biaya | (Rupiah) |
|-----|-----------------------|----------------|
| 1 | Biaya Hidup Rata-rata | 15.000.000,00 |
| 2 | Biaya Penelitian | 6.000.000,00 |
| 3 | Biaya Buku | 3.000.000,00 |
| 4 | Biaya Pendidikan | <i>At cost</i> |
| 5 | Biaya Perjalanan | <i>At cost</i> |

*) Sesuai SK Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti No.282.1/D/PG/2017 tanggal 13 Februari 2017

3.7 JADWAL KEGIATAN BPP-DN

Jadwal lengkap kegiatan BPP-DN dan uraian subkegiatannya dapat dilihat pada Tabel 7. Tiga tahapan penting dalam kegiatan BPP-DN yang perlu mendapat perhatian, baik dari calon penerima maupun perguruan tinggi penyelenggara, adalah sebagai berikut:

- 1) Seluruh berkas persyaratan BPP-DN untuk dosen dikirim ke PPs Penyelenggara yang dituju.
- 2) **Penetapan status calon penerima BPP-DN** oleh PPs Penyelenggara melalui laman beasiswa.ristekdikti.go.id/bppdn paling lambat **Juli 2017**.
- 3) **Proses penetapan daftar calon penerima BPP-DN** menjadi penerima BPP-DN akan ditetapkan oleh Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia, pada bulan **Agustus 2017**.

Tabel 7. Jadwal Kegiatan Penyelenggaraan BPP-DN

| Kegiatan Penyelenggaraan BPP-DN | Waktu |
|--|--------------------------|
| A. PERSIAPAN | |
| 1. Penawaran BPP-DN 2017 kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan PPs | Juni |
| B. PROSES PENDAFTARAN | |
| 2. Dosen mendaftar BPP-DN secara <i>online</i> melalui <i>beasiswa.ristekdikti.go.id/bppdn</i> | 05 – 30 Juni |
| 3. Dosen mendaftarkan diri pada PPs Penyelenggara yang dituju dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan. | Sesuai jadwal PPs Tujuan |
| 4. Calon Mahasiswa wajib mengikuti proses seleksi akademik atau test masuk PPs Penyelenggara yang dituju. | Sesuai jadwal PPs Tujuan |
| C. PROSES PENETAPAN STATUS DAN VERIFIKASI | |
| 5. PPs Penyelenggara menetapkan status Pelamar BPP-DN secara <i>online</i> melalui laman <i>beasiswa.dikti.go.id/bppdn</i> . | Juli |
| 6. Direktorat Kualifikas SDM – Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti melakukan verifikasi terhadap usulan PPs Penyelenggara. | Juli |
| D. PROSES PENETAPAN BPP-DN DAN KONTRAK | |
| 7. Direktorat Kualifikasi SDM - Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti menetapkan dan menyampaikan hasil penetapan Penerima BPP-DN kepada PPs Penyelenggara. | Agustus |
| 8. PPs Penyelenggara menyampaikan hasil penetapan tersebut kepada penerima BPP-DN dan pimpinan PT/Kopertispemilik dosen. | Agustus |
| 9. Penandatanganan Kontrak antara Direktorat Kualifikasi SDM - Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara BPP-DN. | Agustus |
| E. MONITORING DAN EVALUASI | |
| 10. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan BPP-DN | Oktober – November |

V. PENUTUP

Penerbitan Panduan BPP-DN ini merupakan upaya Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti untuk membantu Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta dalam proses pengelolaan BPP-DN. Panduan ini merupakan hasil revisi panduan edisi sebelumnya.

Lampiran 1

A. PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) PENYELENGGARA BPP-DN UNTUK DOSEN

- | | | | |
|----|-------------------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | Institut Pertanian Bogor | 19 | Universitas Negeri Makassar |
| 2 | Institut Seni Indonesia Surakarta | 20 | Universitas Negeri Malang |
| 3 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | 21 | Universitas Negeri Medan |
| 4 | Institut Teknologi Bandung | 22 | Universitas Negeri Padang |
| 5 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 23 | Universitas Negeri Semarang |
| 6 | Universitas Airlangga | 24 | Universitas Negeri Surabaya |
| 7 | Universitas Andalas | 25 | Universitas Negeri Yogyakarta |
| 8 | Universitas Bengkulu | 26 | Universitas Padjadjaran |
| 9 | Universitas Brawijaya | 27 | Universitas Pendidikan Indonesia |
| 10 | Universitas Diponegoro | 28 | Universitas Riau |
| 11 | Universitas Gadjah Mada | 29 | Universitas Sam Ratulangi |
| 12 | Universitas Haluoleo | 30 | Universitas Sebelas Maret |
| 13 | Universitas Hasanuddin | 31 | Universitas Sriwijaya |
| 14 | Universitas Indonesia | 32 | Universitas Sumatera Utara |
| 15 | Universitas Jember | 33 | Universitas Syiah Kuala |
| 16 | Universitas Jenderal Soedirman | 34 | Universitas Tadulako |
| 17 | Universitas Mulawarman | 35 | Universitas Udayana |
| 18 | Universitas Negeri Jakarta | | |

B. PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) PENYELENGGARA BPP-DN

1. Universitas Khatolik Atma Jaya Jakarta
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Universitas Muslim Indonesia
4. Universitas Islam Sultan Agung

Lampiran 1 - lanjutan

DAFTAR PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA DAN PROGRAM STUDI BPP-DN TAHUN 2017

1. INSTITUT PERTANIAN BOGOR (Program Doktor (S3))

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|----|---|---|
| 1 | Agronomi dan Hortikultura | 151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 2 | Biologi Reproduksi | 151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 3 | Biologi Tumbuhan | 027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007 |
| 4 | Biosains Hewan | 027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007 |
| 5 | Entomologi | 151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 6 | Fitopatologi | 151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 7 | Ilmu Akuakultur | 584/DIKTI/KEP/1993, tanggal 02 Oktober 1993 |
| 8 | Ilmu Biomedis Hewan | 027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007 |
| 9 | Ilmu dan Teknologi Benih | 027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007 |
| 10 | Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan | |
| 11 | Ilmu Ekonomi Pertanian | 151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 12 | Ilmu Gizi Manusia | 584/DIKTI/KEP/1993, tanggal 02 Oktober 1993 |
| 13 | Ilmu Kelautan | 151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 14 | Ilmu Keteknikan Pertanian | 151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 15 | Ilmu Nutrisi dan Pakan | 027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007 |
| 16 | Ilmu Pangan | 151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 17 | Ilmu Pengelolaan Hutan | 151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 18 | Ilmu Penyuluhan Pembangunan | 151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 19 | Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | 151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 20 | Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan | 027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007 |
| 21 | Ilmu Tanah | 151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 22 | Ilmu-Ilmu Faal dan Khasiat Obat | 027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007 |
| 23 | Kesehatan Masyarakat Veteriner | 151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 24 | Klimatologi Terapan | 151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 25 | Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan | 027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007 |
| 26 | Konservasi Biodiversitas Tropika | |
| 27 | Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan | 027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007 |
| 28 | Mikrobiologi | 504/SK/BAN-PT/Akred/D/V/2015 |
| 29 | Parasitologi dan Entomologi Kesehatan | 027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007 |
| 30 | Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman | 027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007 |
| 31 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | 027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007 |
| 32 | Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | 151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 33 | Pengelolaan Sumberdaya Perairan | 584/DIKTI/KEP/1993, tanggal 02 Oktober 1993 |
| 34 | Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan | 584/DIKTI/KEP/1993, tanggal 02 Oktober 1993 |
| 35 | Primatologi | 027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007 |

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|----|------------------------------|---|
| 36 | Silvikultur Tropika | 027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007 |
| 37 | Sosiologi Pedesaan | 584/DIKTI/KEP/1993, tanggal 02 Oktober 1993 |
| 38 | Statistika | 151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 39 | Teknologi Industri Pertanian | 584/DIKTI/KEP/1993, tanggal 02 Oktober 1993 |
| 40 | Teknologi Kelautan | 584/DIKTI/KEP/1993, tanggal 02 Oktober 1993 |

2. INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Penciptaan dan Pengkajian Seni | 105/E/O/2011, tanggal 12 Mei 2011 |

3. INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Penciptaan dan Pengkajian Seni | 1188/D/T/2006, tanggal 12 April 2006 |

4. INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | Aeronotika dan Astronotika | 3010/D/T/2004, tanggal 04 Agustus 2004 |
| 2 | Arsitektur | 150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 3 | Astronomi | 150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 4 | Biologi | 150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 5 | Farmasi | 150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 6 | Fisika | 150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 7 | Ilmu dan Teknik Material | 066/SK/K01/OT/2006, tanggal 06 Maret 2006 |
| 8 | Ilmu Seni Rupa dan Desain | 066/SK/K01/OT/2006, tanggal 06 Maret 2006 |
| 9 | Kimia | 150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 10 | Matematika | 150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 11 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 12 | Rekayasa Pertambangan | 150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 13 | Sains Kebumihan | 3010/D/T/2004, tanggal 04 Agustus 2004 |
| 14 | Sains Manajemen | 174/SK/K01/OT/2008, tanggal 05 Agustus 2008 |
| 15 | Teknik dan Manajemen Industri | 150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 16 | Teknik Elektro dan Informatika | 150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 17 | Teknik Fisika | 3773/D/T/2004, tanggal 15 September 2004 |
| 18 | Teknik Geodesi & Geomatika | 150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 19 | Teknik Geofisika | 4868/D/T/2004, tanggal 30 Desember 2004 |
| 20 | Teknik Geologi | 150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 21 | Teknik Kimia | 150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 22 | Teknik Lingkungan | 3010/D/T/2004, tanggal 04 Agustus 2004 |
| 23 | Teknik Mesin | 150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 24 | Teknik Perminyakan | 3010/D/T/2004, tanggal 04 Agustus 2004 |
| 25 | Teknik Sipil | 150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 26 | Transportasi | 150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |

5. INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|----|----------------------|---|
| 1 | Ilmu Arsitektur | 3997/D/T/K-N/2009, tanggal 09 Desember 2009 |
| 2 | Ilmu Fisika | 1503/D/T/2007, tanggal 22 Juni 2007 |
| 3 | Ilmu Kimia | 1250/D/T/2009, tanggal 31 Juli 2009 |
| 4 | Ilmu Komputer | |
| 5 | Ilmu Statistik | 2175/D/T/K-N/2009, tanggal 11 Mei 2009 |
| 6 | Ilmu Teknik Elektro | 1732/D/T/2007, tanggal 12 Juli 2007 |
| 7 | Ilmu Teknik Kelautan | 447/D/T/2007, tanggal 07 Maret 2007 |
| 8 | Ilmu Teknik Kimia | 3998/D/T/K-N/2009, tanggal 09 Desember 2009 |
| 9 | Ilmu Teknik Sipil | 444/D/T/2007, tanggal 07 Maret 2007 |
| 10 | Teknik Industri | 1250/D/T/2009, tanggal 31 Juli 2009 |
| 11 | Teknik Lingkungan | 1250/D/T/2009, tanggal 31 Juli 2009 |
| 12 | Teknik Mesin | 1250/D/T/2009, tanggal 31 Juli 2009 |

6. UNIVERSITAS AIRLANGGA

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|----|---|---|
| 1 | Ilmu Akuntansi | 1412/UN3/2014, Tanggal 31 Oktober 2014 |
| 2 | Ilmu Ekonomi | 12186/UN3/KR/2013, tanggal 02 April 2013 |
| 3 | Ilmu Ekonomi Islam | 27/UN.3/KR/2013, tanggal 6 September 2013 |
| 4 | Ilmu Farmasi | 7426/H3/KR/2012, Tanggal 7 Juni 2012 |
| 5 | Ilmu Hukum | 12186/UN3/KR/2013, Tanggal 2 April 2013 |
| 6 | Ilmu Kedokteran | 79/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007 |
| 7 | Ilmu Kesehatan | 12186/UN3/KR/2012, Tanggal 2 April 2012 |
| 8 | Ilmu Manajemen | 12835/H3/KR/2012, Tanggal 12 Oktober 2012 |
| 9 | Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 12186/UN3/KR/2013, Tanggal 2 April 2013 |
| 10 | Ilmu Psikologi | 3756/H3/KR/2012, Tanggal 13 Maret 2012 |
| 11 | Ilmu Sosial | 12186/UN3/KR/2013, Tanggal 2 April 2013 |
| 12 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | 27/UN3/KR/2013, Tanggal 6 September 2013 |
| 13 | Sains Veteriner | 1412/UN3/2014, Tanggal 31 Oktober 2014 |

7. UNIVERSITAS ANDALAS

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|----------------|--|
| 1 | Biomedik | 2204/D/T/2008, tanggal 15 Juli 2008 |
| 2 | Ilmu Ekonomi | 1074/D/T/K-N/2010, tanggal 14 Januari 2010 |
| 3 | Ilmu Hukum | 449/D/T/2009, tanggal 06 April 2009 |
| 4 | Ilmu Kimia | 582/D/T/2009, tanggal 21 April 2009 |
| 5 | Ilmu Pertanian | 1074/D/T/K-N/2010, tanggal 14 Januari 2010 |

8. UNIVERSITAS BENGKULU

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|----------------|---------------------------------------|
| 1 | Ilmu Manajemen | 496/E/O/2013, tanggal 18 Oktober 2013 |

9. UNIVERSITAS BRAWIJAYA

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|----|-----------------------------|--|
| 1 | Administrasi | 1730/D/T/2007, tanggal 12 Juli 2007 |
| 2 | Biologi | 162/D/O/2010, tanggal 04 Nopember 2010 |
| 3 | Ilmu Akuntansi | 2856/D/T/K-N/2009, tanggal 15 Juli 2009 |
| 4 | Ilmu Ekonomi | 2857/D/T/K-N/2009, 15 Juli 2009 |
| 5 | Ilmu Hukum | 436/D/T/2007, tanggal 07 Maret 2007 |
| 6 | Ilmu Kedokteran | 66/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007 |
| 7 | Ilmu Manajemen | 66/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007 |
| 8 | Ilmu Perikanan dan Kelautan | 69/D/T/2009, tanggal 20 Januari 2009 |
| 9 | Ilmu Pertanian | 66/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007 |
| 10 | Ilmu Sosiologi | 418/E/O/2013, tanggal 27 September 2013 |
| 11 | Ilmu Teknik Mesin | 1665/D/T/2008, tanggal 23 Mei 2008 |
| 12 | Ilmu Teknik Sipil | 1665/D/T/2008, tanggal 23 Mei 2008 |
| 13 | Ilmu Ternak | 550/D/T/2008, tanggal 05 Maret 2008 |
| 14 | Teknik Industri Pertanian | 420/E/O/2013, tanggal 27 September 2013 |

10. UNIVERSITAS DIPONEGORO

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|----|-------------------------------|--|
| 1 | Administrasi Publik | 163/D/O/2010, tanggal 4 Nopember 2010 |
| 2 | Ilmu Arsitektur dan Perkotaan | 3417/D/T/K-N/2009, tanggal 09 September 2009 |
| 3 | Ilmu Ekonomi | 435/D/T/2007, tanggal 07 Maret 2007 |
| 4 | Ilmu Hukum | 111/DIKTI/KEP/2007, tanggal 31 Agustus 2007 |
| 5 | Ilmu Kedokteran | 111/DIKTI/KEP/2007, tanggal 31 Agustus 2007 |
| 6 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | |
| 7 | Ilmu Lingkungan | 2782/D/T/2008, tanggal 20 Agustus 2008 |
| 8 | Ilmu Teknik Sipil | 3553/D/T/K-N/2009, tanggal 01 Oktober 2009 |
| 9 | Ilmu Ternak | 2429/D/T/2008, tanggal 04 Agustus 2008 |
| 10 | Manajemen Sumberdaya Pantai | 3024/D/T/2004, tanggal 04 Agustus 2004 |

11. UNIVERSITAS GADJAH MADA

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|------------------------------|---|
| 1 | Bioteknologi | 526/P/SK/HT/2008, tanggal 24 November 2008 |
| 2 | Ilmu Administrasi Publik | 526/P/SK/HT/2008, tanggal 24 November 2008 |
| 3 | Ilmu Agama dan Lintas Budaya | 526/P/SK/HT/2008, tanggal 01 Januari 2008 |
| 4 | Ilmu Akuntansi | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|----|---|---|
| 5 | Ilmu Arsitektur | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 6 | Ilmu Biologi | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 7 | Ilmu Ekonomi | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 8 | Ilmu Farmasi | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 9 | Ilmu Filsafat | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 10 | Ilmu Fisika | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 11 | Ilmu Geografi | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 12 | Ilmu Hukum | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 13 | Ilmu Kedokteran | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 14 | Ilmu Kedokteran Gigi | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 15 | Ilmu Kehutanan | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 16 | Ilmu Kimia | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 17 | Ilmu Komputer | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 18 | Ilmu Lingkungan | 526/P/SK/HT/2008, tanggal 24 November 2008 |
| 19 | Ilmu Manajemen | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 20 | Ilmu Matematika | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 21 | Ilmu Pangan | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 22 | Ilmu Pertanian | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 23 | Ilmu Peternakan | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 24 | Ilmu Politik | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 25 | Ilmu Psikologi | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 26 | Ilmu Sosiologi | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 27 | Ilmu Teknik Elektro | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 28 | Ilmu Teknik Geologi | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 29 | Ilmu Teknik Geomatika | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 30 | Ilmu Teknik Kimia | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 31 | Ilmu Teknik Mesin | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 32 | Ilmu Teknik Pertanian | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 33 | Ilmu Teknik Sipil | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 34 | Ilmu-Ilmu Humaniora | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 35 | Inter-Religious Studies | |
| 36 | Kajian Budaya dan Media | 526/P/SK/HT/2008, tanggal 01 Januari 2008 |
| 37 | Kajian Pariwisata | 526/P/SK/HT/2008, tanggal 01 Januari 2008 |
| 38 | Kependudukan | 526/P/SK/HT/2008, tanggal 24 November 2008 |
| 39 | Pengkajian Amerika | 526/P/SK/HT/2008, tanggal 01 Januari 2008 |
| 40 | Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa | 526/P/SK/HT/2008, tanggal 24 November 2008 |
| 41 | Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan | 526/P/SK/HT/2008, tanggal 24 November 2008 |
| 42 | Sains Veteriner | 153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 43 | Studi Kebijakan | 526/P/SK/HT/2008, tanggal 01 Januari 2008 |

12. UNIVERSITAS HALUOLEO

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|----------------|-------------------------------------|
| 1 | Ilmu Ekonomi | 996/E/T/2011, tanggal 14 Juli 2011 |
| 2 | Ilmu Pertanian | 1054/E/T/2011, tanggal 25 Juli 2011 |

13. UNIVERSITAS HASANUDDIN

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|---------------------|---|
| 1 | Administrasi Publik | 889/D/T/2009, tanggal 11 Juni 2009 |
| 2 | Ilmu Ekonomi | 154/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 3 | Ilmu Hukum | 01/DIKTI/KEP/1995, tanggal 03 Januari 1995 |
| 4 | Ilmu Kedokteran | 01/DIKTI/KEP/1995, tanggal 03 Januari 1995 |
| 5 | Ilmu Kimia | 628/D/T/2002, tanggal 04 Maret 2002 |
| 6 | Ilmu Linguistik | 154/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 7 | Ilmu Pertanian | 154/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 8 | Ilmu Teknik Sipil | 471/D/T/2009, tanggal 06 April 2009 |

14. UNIVERSITAS INDONESIA

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|----|---------------------------|---|
| 1 | Arsitektur | 627/SK/R/UI/2009, tanggal 25 Juni 2009 |
| 2 | Epidemiologi | 152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 3 | Ilmu Administrasi | 3759/D/T/2005, tanggal 27 Oktober 2005 |
| 4 | Ilmu Akuntansi | 4377/D/T/2004, tanggal 02 November 2004 |
| 5 | Ilmu Antropologi | 152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 6 | Ilmu Arkeologi | 152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 7 | Ilmu Bahan-Bahan | 152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 8 | Ilmu Biologi | 152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 9 | Ilmu Ekonomi | 152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 10 | Ilmu Farmasi | 0072/SK/R/UI/2010, tanggal 02 Februari 2010 |
| 11 | Ilmu Filsafat | 205/SK/R/UI/2007, tanggal 11 April 2007 |
| 12 | Ilmu Gizi | 152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 13 | Ilmu Hukum | 152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 14 | Ilmu Kedokteran | 152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 15 | Ilmu Kedokteran Gigi | 152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 16 | Ilmu Biomedik | |
| 17 | Ilmu Keperawatan | 683/SK/R/UI/2008, tanggal 25 Juni 2008 |
| 18 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 19 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 625/SK/R/UI/2008, tanggal 16 Juni 2008 |
| 20 | Ilmu Kimia | 152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 21 | Ilmu Komputer | 152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 22 | Ilmu Komunikasi | 152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 23 | Ilmu Lingkungan | 412/SK/R/UI/2007, tanggal 16 Juli 2007 |

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|----|-------------------------------|---|
| 24 | Ilmu Linguistik | 152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 25 | Ilmu Manajemen | 152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 26 | Ilmu Politik | 152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 27 | Ilmu Psikologi | 152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 28 | Ilmu Sejarah | 152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 29 | Ilmu Susastra (sastra) | |
| 30 | Ilmu Sosiologi | 152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 31 | Ilmu Teknik Mesin | 16/D/T/2006, tanggal 03 Januari 2006 |
| 32 | Ilmu Teknik Sipil | 152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 33 | Kriminologi | 1422/SK/R/UI/2008, tanggal 21 November 2008 |
| 34 | Teknik Kimia | 043/SK/R/UI/2008 |
| 35 | Teknik Elektro | |
| 36 | Teknik Metalurgi dan Material | 061/SK/R/UI/2008, tanggal 25 Januari 2008 |

15. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|----------------------|-----------------------------|
| 1 | Ilmu Hukum | |

16. UNIVERSITAS JEMBER

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Ilmu Administrasi | 2083/D/T/2008, tanggal 07 Juli 2008 |

17. UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | Biologi | 311/E/O/2013 tanggal 22 Agustus 2013 |
| 2 | Ilmu Manajemen | 312/E/O/2013 tanggal 22 Agustus 2013 |

18. UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Linguistik Terapan Bahasa Inggris | 1415/D/T/K-III/2010, tanggal 24-02-2010 |

19. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|----------------------|--|
| 1 | Ilmu Hukum | 4292/D/T/2008 tanggal 28 Nopember 2008 |

20. UNIVERSITAS MULAWARMAN

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|----------------|---|
| 1 | Ilmu Kehutanan | 2664/D/T/K-N/2009, tanggal 30 Juni 2009 |

21. UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|----------------|---------------------------------------|
| 1 | Ilmu Hukum | 2207/D/T/2007 tanggal 15 Agustus 2007 |
| 2 | Ilmu Manajemen | 2207/D/T/2007 tanggal 15 Agustus 2007 |

22. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|--|---|
| 1 | Ilmu Pendidikan Bahasa | 136/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 2 | Pend Kependudukan dan Lingkungan Hidup | 136/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 3 | Pendidikan Olahraga | 136/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 4 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | 418/DIKTI/KEP/2000, tanggal 07 Mei 2000 |
| 5 | Teknologi Pendidikan | 136/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 6 | Manajemen Pendidikan | |

23. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|--|---|
| 1 | Ilmu Administrasi Publik | 4881/D/T/2004, tanggal 31 Desember 2004 |
| 2 | Ilmu Pendidikan | 9686/D/T/K-N/2011, tanggal 29-11-2011 |
| 3 | Ilmu Pendidikan Bahasa | 465/D/T/2009, tanggal 6 April 2009 |
| 4 | Ilmu Sosiologi | 4881/D/T/2004, tanggal 31 Desember 2004 |
| 5 | Pendidikan Bahasa Inggris | 891/D/T/2009, tanggal 11 Juni 2009 |
| 6 | Pendidikan Ekonomi | 28/D/O/2011, tanggal 26 Januari 2011 |
| 7 | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup | 28/D/O/2011, tanggal 26 Januari 2011 |

24. UNIVERSITAS NEGERI MALANG

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | Bimbingan dan Konseling | 59/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007 |
| 2 | Manajemen Pendidikan | 5892/D/T/K-N/2011, tanggal 22-03-2011 |
| 3 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 59/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007 |
| 4 | Pendidikan Bahasa Inggris | 59/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007 |
| 5 | Pendidikan Biologi | 59/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007 |
| 6 | Pendidikan Ekonomi | 59/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007 |
| 7 | Pendidikan Geografi | 22/D/O/2011, tanggal 24 Januari 2011 |
| 8 | Pendidikan Kejuruan | 40/D/O/2011, tanggal 03 Maret 2011 |

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|----|------------------------|---|
| 9 | Pendidikan Matematika | 1843/D/T/2009, tanggal 14 Oktober 2009 |
| 10 | Psikologi Pendidikan | 138/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 11 | Teknologi Pembelajaran | 59/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007 |

25. UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Manajemen Kependidikan | 2009/D/T/2008, tanggal 25 Juni 2008 |

26. UNIVERSITAS NEGERI PADANG

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Ilmu Pendidikan | 1736/D/T/2007, tanggal 12 Juli 2007 |
| 2 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | 16/E/O/2013, tanggal 15 Januari 2013 |

27. UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Manajemen Kependidikan | 449/D/T/2007, tanggal 07 Maret 2007 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | |
| 3 | Pendidikan Bahasa Inggris | |
| 4 | Pendidikan Olahraga | 2476/D/T/K-N/2009, tanggal 12 Juni 2009 |
| 5 | Pendidikan Seni | |

28. UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Ilmu Keolahragaan | 2362/D/T/2001, tanggal 11 Juli 2001 |
| 2 | Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra | 1443/D/T/2003, tanggal 09 Juli 2003 |
| 3 | Pendidikan Matematika | 124/DIKTI/KEP/1999, tanggal 7 April 1999 |

29. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | Ilmu Pendidikan | 4801/D/T/2008, tanggal 31 Desember 2008 |
| 2 | Ilmu Pendidikan Bahasa | |
| 3 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | 1966/D/T/2008, tanggal 11 Juni 2008 |
| 4 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | 4602/D/T/2008, tanggal 19 Desember 2008 |

30. UNIVERSITAS PADJADJARAN

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|----|------------------------|---|
| 1 | Hubungan Internasional | 146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 2 | Ilmu Administrasi | 146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 3 | Ilmu Ekonomi | 146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 4 | Ilmu Hukum | 146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 5 | Ilmu Kedokteran | 146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 6 | Ilmu Kimia | 146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 7 | Ilmu Komunikasi | 217/E/O/2013 tanggal 28 Mei 2013 |
| 8 | Ilmu Lingkungan | 133/E/O/2011 tanggal 4 Juli 2011 |
| 9 | Ilmu Manajemen | 217/E/O/2013 tanggal 28 Mei 2013 |
| 10 | Ilmu Pertanian | 146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 11 | Ilmu Sastra | 146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 12 | Kesejahteraan Sosial | 146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 13 | Peternakan | 146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 14 | Psikologi | 146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 15 | Sosiologi | 146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007 |
| 16 | Teknik Geologi | 6864/D/T/K-N/2011 tanggal 11 Mei 2011 |

31. UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|----|------------------------------------|--|
| 1 | Administrasi Pendidikan | 588/DIKTI/Kep/1993, tanggal 21 Oktober 1993 |
| 2 | Bimbingan dan Konseling | 588/DIKTI/Kep/1993, tanggal 21 Oktober 1993 |
| 3 | Ilmu Manajemen | |
| 4 | Linguistik | 5284/UN40/DT/2011, tanggal 06 September 2011 |
| 5 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 588/DIKTI/Kep/1993, tanggal 21 Oktober 1993 |
| 6 | Pendidikan Bahasa Inggris | 3046/J33/PP.03.02/2005, tanggal 08 Juni 1993 |
| 7 | Pendidikan Dasar | 630/UN40/DT/2012, tanggal 25 September 2012 |
| 8 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 588/DIKTI/Kep/1993, tanggal 21 Oktober 1993 |
| 9 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 588/DIKTI/Kep/1993, tanggal 21 Oktober 1993 |
| 10 | Pendidikan Kewarganegaraan | 4879/H.40/PP/2008, tanggal 15 Agustus 2008 |
| 11 | Pendidikan Luar Sekolah | 588/DIKTI/KEP/1993, tanggal 21 Oktober 1993 |
| 12 | Pendidikan Matematika | 5263/J33/PP.03.02/2005, tanggal 14 Okt 1993 |
| 13 | Pendidikan Olahraga | 3039/J33/PP.03.02/2005, tanggal 08 Juni 1993 |
| 14 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | 4878/H.40/PP/2008, tanggal 15 Agustus 2008 |
| 15 | Pendidikan Umum | 588/DIKTI/KEP/1993, tanggal 21 Oktober 1993 |
| 16 | Pengembangan Kurikulum | 588/DIKTI/Kep/1999, tanggal 21 Oktober 1999 |

32. UNIVERSITAS RIAU

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|-----------------|-------------------------------|
| 1 | Ilmu Lingkungan | 160/D/O/2010, 4 November 2011 |

33. UNIVERSITAS SAM RATULANGI

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|---------------|---|
| 1 | Entomologi | 1036/D/T/2004, tanggal 27 Pebruari 2004 |
| 2 | Linguistik | 1037/D/T/2004, tanggal 27 Pebruari 2004 |

34. UNIVERSITAS SEBELAS MARET

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Ilmu Ekonomi | 2088/D/T/2008, tanggal 07 Juli 2008 |
| 2 | Ilmu Hukum | 2474/D/T/K-N/2009, tanggal 12 Juni 2009 |
| 3 | Ilmu Kedokteran | 583/SK/BAN-PT/akred/D/VI/2015 |
| 4 | Ilmu Lingkungan | 2360/D/T/2008, tanggal 25 Juli 2008 |
| 5 | Ilmu Linguistik | 2964/D/T/K-N/2009, tanggal 24 Juli 2009 |
| 6 | Ilmu Pendidikan | 817/D/T/2009, tanggal 27 Mei 2009 |
| 7 | Ilmu Penyuluhan Pembangunan | 06/D/T/2008, tanggal 02 Januari 2008 |
| 8 | Ilmu Pertanian | 274/E/O/2011 |
| 9 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2666/D/T/K-N/2009, tanggal 30 Juni 2009 |

35. UNIVERSITAS SRIWIJAYA

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|-----------------|--|
| 1 | Ilmu Ekonomi | 154/D/O/2010, tanggal 18 Oktober 2010 |
| 2 | Ilmu Hukum | 14528/D/T/K-N/2013, tanggal 11 FEBRUARI 2013 |
| 3 | Ilmu Lingkungan | 12811/D/T/K-N/2012, tanggal 15 Agustus 2012 |
| 4 | Ilmu Pertanian | 13341/D/T/K-N/2012, tanggal 22 Oktober 2012 |

36. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|----|---|---|
| 1 | Akuntansi | 941/H5.1.R/SK/PRS/2009, tanggal 11 Mei 2009 |
| 2 | Farmasi | 939/H5.1.R/SK/PRS/2009 tanggal 11 Mei 2009 |
| 3 | Ilmu Biologi | 930/H5.1.R/SK/PRS/2014 |
| 4 | Ilmu Fisika | 921/H5.1.R/SK/PRS/2009 |
| 5 | Ilmu Hukum | 80/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007 |
| 6 | Ilmu Kedokteran | 80/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007 |
| 7 | Ilmu Kimia | 913/D/T/2002, tanggal 13 Mei 2002 |
| 8 | Ilmu Linguistik | 4880/D/T/2004, tanggal 31 Desember 2004 |
| 9 | Ilmu Matematika | 920/H5.1.R/SP/PRS/2009 |
| 10 | Ilmu Pengelolaan SDA dan Lingkungan | 3184/D/T/2004, tanggal 19 Agustus 2004 |
| 11 | Ilmu Perencanaan Pembangunan Wil & Pedesaan | 3543/D/T/2003, tanggal 13 November 2003 |
| 12 | Ilmu Pertanian | 1959/D/T/2008, tanggal 11 Juni 2008 |

37. UNIVERSITAS SYIAH KUALA

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|---------------|--|
| 1 | Ilmu Ekonomi | 52/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007 |
| 2 | Ilmu Hukum | 398/E/O/2012, tanggal 23 Nopember 2012 |

38. UNIVERSITAS TADULAKO

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|----------------|-------------------------------------|
| 1 | Ilmu Pertanian | 483/E/T/2011, tanggal 11 April 2011 |

39. UNIVERSITAS UDAYANA

| | Program Studi | Nomor dan Tanggal SK |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Ilmu Ekonomi | 1249/D/T/2009, tanggal 31 Juli 2009 |
| 2 | Ilmu Hukum | |
| 3 | Ilmu Kedokteran Biomedik | 113/DIKTI/KEP/2007, tanggal 31 Agustus 2007 |
| 4 | Ilmu Linguistik | 113/DIKTI/KEP/2007, tanggal 31 Agustus 2007 |
| 5 | Ilmu Pertanian | 3538/D/T/2007, tanggal 05 November 2007 |
| 6 | Ilmu Peternakan | 86/D/O/2010 tanggal 15 Juni 2010 |
| 7 | Kajian Budaya | 1963/D/T/2008, tanggal 11 Juni 2008 |
| 8 | Pariwisata | |

LAMPIRAN 2a : Surat Penugasan Kopertis

PERNYATAAN PENUGASAN MENGIKUTI SELEKSI PROGRAM PASCASARJANA UNTUK MEMPEROLEH DANA BPP-DN KEMENRISTEKDIKTI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Koordinator Kopertis :

dengan persetujuan Rektor/Direktur/Ketua tempat yang bersangkutan bekerja, kami menugaskan

Saudara :

Perguruan Tinggi :

NIDN/NIK/SK Yayasan :

untuk mengikuti seleksi masuk program pendidikan pascasarjana pada:

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

Program : Magister/Doktor/Spesialis *)

....., 2017

Menyetujui
Rektor/Direktur/Ketua,

Koordinator
Kopertis Wilayah

(.....)

NIP:

(.....)

NIP:

*) Coret yang Tidak Perlu,

LAMPIRAN 2b: Surat Penugasan PTN Pemilik Dosen

**PERNYATAAN PEMBERIAN IJIN
MENGIKUTI SELEKSI PROGRAM PASCASARJANA
UNTUK MEMPEROLEH DANA BPP-DN KEMENRISTEKDIKTI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Rektor/Ketua/Direktur
Perguruan Tinggi :

mengijinkan

Saudara :

Fakultas/Program Studi :

NIDN/NIP :

untuk mengikuti seleksi masuk program pendidikan pascasarjana pada:

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

Jenjang : Magister/Doktor/Spesialis *)

....., 2017

Rektor /Direktur/Ketua,

(.....)

*) Coret yang Tidak Perlu,